

HASIL RAPAT KERJA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
BOGOR, 8 – 9 FEBRUARI 2017

Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tanggal 8 sampai dengan 9 Februari 2017 telah melakukan Rapat Kerja dengan peserta seluruh pejabat BSN mulai dari Kepala, Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional Senior, Staf Perwakilan Pusat Perumusan Standar di lingkungan BSN.

Tema Raker : **Memantapkan Kinerja Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

Pembahasan dibagi dalam 3 kelompok kerja (POKJA), yaitu :

- POKJA 1 Laporan akuntabilitas kinerja BSN 2016 dan Perjanjian kinerja 2017
- POKJA 2 Sinergi kegiatan 2017 dan Usulan kegiatan 2018
- POKJA 3 Sumberdaya Manusia

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam Rapat Kerja tersebut adalah:

POKJA 1 Laporan akuntabilitas kinerja BSN tahun 2016 dan perjanjian kinerja 2017

1. Laporan akuntabilitas kinerja BSN tahun 2016

Kondisi :

POKJA 1 telah menyusun konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja BSN tahun 2016. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan BSN mulai dari tingkat eselon III sampai dengan Kepala BSN secara berjenjang. Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja BSN berdasarkan Laporan akuntabilitas kinerja di bawahnya. POKJA 1 telah memberikan poin-poin di setiap indikator kinerja utama sebagai acuan Tim LAKIP.

Tindak lanjut:

Tim LAKIP segera menyusun Laporan akuntabilitas kinerja BSN berdasarkan poin-poin yang diberikan POKJA 1. Laporan akuntabilitas kinerja BSN harus telah diserahkan kepada Kementerian PAN dan RB sebelum tanggal 28 Februari 2017

PIC : Biro PKT

Waktu: 28 Februari 2017

2. Perjanjian kinerja BSN tahun 2017**Kondisi :**

Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan unit kerja untuk melaksanakan suatu kinerja yang diperjanjikan kepada atasannya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari Kementerian PAN dan RB dan masukan dari stakeholder BSN, POKJA 1 telah menyusun draft Perjanjian Kinerja Kepala BSN serta turunannya sampai dengan pejabat eselon IV. Perjanjian kinerja Kepala BSN, Eselon I dan Eselon II ditandatangani pada saat Rapat Kerja BSN 2017.

Tindak lanjut:

Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV segera menyelesaikan Perjanjian Kinerja masing-masing setelah Perjanjian Kinerja Kepala BSN, Eselon 1 dan Eselon 2 ditandatangani.

PIC : Biro PKT dan para kepala unit kerja eselon 2

Waktu: 28 Februari 2017

POKJA 2 Sinergi kegiatan 2017 dan Usulan kegiatan 2018**1. Sinergi kegiatan tahun 2017****Kondisi :**

Sinergi kegiatan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran sesuai sasaran kinerja BSN, termasuk untuk mengisi kegiatan dalam rangka perintisan UPT di Palembang dan Makassar. Pokja telah mengidentifikasi kegiatan tahun 2017 berdasarkan rencana kegiatan tahun 2017 di unit kerja sebagai dasar melakukan optimalisasi dan relokasi sesuai prioritas baik prioritas nasional 'Pengembangan Infrastruktur Mutu' maupun prioritas yang telah ditetapkan BSN.

Usulan :

1. Dilakukan pemetaan rencana kegiatan 2017 berdasarkan Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas BSN. Terdapat empat dimensi yang dijadikan sektor unggulan dalam keterkaitan program nasional dan program BSN yaitu Dimensi pembangunan manusia, dimensi sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, dan dimensi politik, hukum, dan keamanan.

2. Dilakukan sinergi kegiatan BSN di dua lokasi rintisan UPT yaitu Palembang dan Makassar
3. Perlu diintegrasikan lagi prioritas BSN 2017 dan 2018 dengan Renstra BSN

Tindak Lanjut:

1. Seluruh unit kerja mereviu kembali rencana kegiatan tahun 2017 agar menyesuaikan dengan prioritas nasional dan prioritas BSN serta yang memberikan dampak langsung pada masyarakat.
2. Pusat Kerjasama Standardisasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di daerah, terutama untuk mengisi kegiatan rintisan UPT di Makassar dan Palembang
3. Unit kerja terkait agar menghentikan sementara penambahan MoU dengan daerah, dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk MoU dan menindaklanjuti MoU yang masih aktif.

PIC: Seluruh Unit Kerja

Waktu: Februari – Maret , 2017

2. Rencana Program 2018

Kondisi:

BSN telah mengusulkan ke Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018, untuk melaksanakan proyek prioritas nasional 2018, yaitu program prioritas kesehatan, prioritas pengembangan usaha dan pariwisata, prioritas penanggulangan kemiskinan, prioritas politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Tindak lanjut:

- Dalam mengusulkan kegiatan tahun 2018, seluruh unit kerja harus mengacu pada proyek prioritas nasional tersebut
- Akan segera dilakukan rapat pimpinan pada tanggal 16 Februari 2017 untuk menetapkan sektor prioritas (produk/sektor unggulan)

PIC :Seluruh Eselon 2

Waktu : Februari, 2017

POKJA 3 Sumberdaya Manusia

1. Pemetaan SDM

Kondisi :

Pemetaan SDM telah dilakukan Pokja 3 dengan dukungan data dari Biro HOH dan masing – masing unit kerja telah melakukan pemetaan SDM BSN yang memuat antara lain :

1. profil SDM
2. evaluasi pemenuhan kebutuhan pegawai per unit kerja,

3. hasil identifikasi nomenklatur jabatan pelaksanaan berdasarkan evaluasi jabatan tahun 2012, e-formasi, dan Permen PAN dan RB No. 25 tahun 2016.

Selain itu, agar diperoleh Standar Kompetensi Teknis yang tepat dalam mendukung tugas dan fungsi jabatan dan melakukan Gap Analysis (membandingkan Standar Kompetensi Teknis Jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai) maka Biro HOH telah menyusun:

1. Kamus kompetensi teknis
2. *Job competency profile*

Tindak lanjut:

Biro HOH agar mengkoordinasikan :

1. perbaikan informasi jabatan, peta jabatan, dan SK Jabatan, Januari – Maret 2017
2. pembahasan secara panel seluruh jabatan di BSN pada tanggal 15 – 17 Februari 2017
3. pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis untuk mengisi kebutuhan PPNNP (sebelum penetapan SK) pada Maret – Mei 2017 meliputi :
 - workshop/diklat asesor kompetensi teknis
 - asesmen kompetensi teknis

PIC : Biro HOH dan PKT

Waktu : Januari – Mei 2017

2. Pola Karier

Kondisi:

Telah disusun kerangka pedoman Pola Karier BSN oleh Pokja 3

Tindak lanjut:

1. Biro HOH akan melakukan pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pola Karier yang dilakukan akhir Februari 2017
2. Biro HOH akan menyusun draft dengan target selesai April 2017
3. Biro HOH mengkoordinasikan pembahasan Pedoman Pola Karier pada April – Akhir Mei 2017, target penetapan pada awal Juni 2017
4. Biro HOH melakukan sosialisasi Pedoman ke seluruh unit kerja pada awal Juli 2017

PIC : Biro HOH

Waktu : Februari – Juli 2017

3. Aturan Mengenai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Kondisi:

Pengadaan PPNPN di lingkungan BSN saat ini hanya mencakup satpam, pramubakti, petugas kebersihan, pengemudi, administrasi, dan sekretaris yang bersumber dari dana APBN. Perlu direncanakan adanya pengadaan PPNPN di luar lingkup yang telah disebutkan di atas. Telah disusun Draft Surat Edaran PPNPN yang di dalamnya mengatur tentang alur proses pengadaan, perekrutan dan evaluasi PPNPN.

Tindak lanjut:

Biro HOH menyusun Surat Edaran PPNPN untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala BSN.

PIC: Biro HOH

Waktu: Februari, 2017

4. SDM rintisan UPT

Kondisi :

Pokja 3 telah menyusun ruang lingkup pekerjaan, kriteria dan jumlah pegawai yang akan ditugaskan di rintisan UPT Palembang dan Makassar.

Tindak Lanjut:

1. Perlu pembahasan lebih lanjut terkait kriteria pegawai yang akan ditugaskan di rintisan UPT.
2. Perlu pembahasan mengenai status pegawai yang ditugaskan di rintisan UPT.
3. Perlu dipertimbangkan pemenuhan SDM rintisan UPT melalui kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
4. Rintisan UPT perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah akademik UPT.

PIC: Biro HOH

Waktu: Februari – Maret, 2017

5. Lain-lain

Masalah: (slide 23-26)

1. Belum terdapat peraturan jumlah hari ijin maksimal yang bisa diberikan kepada pegawai dalam kurun waktu 1 tahun.
2. Pegawai yang terlambat sering memanfaatkan lupa absen.
3. Belum adanya cuti khusus untuk ibadah.
4. Belum terdapat pembekalan bagi pegawai yang akan purnabakti.

Usulan tindak lanjut:

- a. Ijin diluar ketentuan yang berlaku harus mendapatkan persetujuan dari Eselon II yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Biro HOH cq. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
- b. Keterangan lupa absen bisa diberikan bagi yang benar – benar lupa absen dengan persetujuan atasan yang bersangkutan, maksimal 2 kali dalam sebulan dan tidak bersifat rutinitas.
- c. Perlu melakukan review atas peraturan Kepala BSN terkait pemberian tunjangan kinerja.
- d. Pemberian cuti ibadah menggunakan hak cuti tahunan, bisa ditambahkan 2 hari.
- e. Keikutsertaan kegiatan profesi di luar tusinya diberikan berdasarkan seleksi dan merupakan penghargaan baik berupa diklat ataupun program pengembangan kompetensi berdasarkan kinerja yang dicapai. Perlu disusun pedoman aturan internal untuk semua pegawai.
- f. Pembekalan untuk PNS yang akan pensiun, perlu diberikan 2 tahun sebelum pensiun dengan program difokuskan sesuai dengan tugas di BSN seperti assesor, trainer, anggota Komtek dan evaluator SNI Award dengan diwadahi oleh koperasi BSN. Program pembekalan lainnya tetap dimungkinkan.
- g. Program Pengembangan kompetensi terkait dengan diklat manajemen dan fungsional menjadi tanggung jawab Biro HOH. Diklat kompetensi teknis SPK dapat diselenggarakan oleh unit kerja Eselon II dan dapat berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi.

PIC : Biro HOH dan unit kerja eselon II

Waktu : April, 2017

Demikian hasil rapat kerja ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala,

Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc